



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN

PUSAT LAYANAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR: 180.780/037/BKS/X/2022

NOMOR: 34044/UN4.1.3.4/HK/07.00/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI (PEMETAAN KOMPETENSI) PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Pada Hari Ini Kamis Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-10-2022) bertempat di Makassar kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. ANDI SISWANTA

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Makassar, berdasarkan
Keputusan Wali Kota Makassar Nomor
821.22.1923-2021 Tanggal 23 Juli 2021 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan
Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Makassar berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad
Yani No.2, Kota Makassar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Makassar selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

I	A	Л	1	11	4	Δ	N	Л	A	Д	Δ	n	T	Δ.	n	Л	Δ	9
-81	41	71		2.5	-		V١	98	83	72	~	-		-	w	78	~	٨

Jabatan Kepala Pusat Layanan Psikologi Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea KM. 10 Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Psikologi Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal ini secara bersama-sama dapat disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkedudukan di Kota Makassar.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga profesional yang memberikan berbagai layanan psikologi, yang mencakup lingkup Psikologi Klinis, Psikologi Sosial, Psikologi Pendidikan, dan Psikologi Industri dan Organisasi..

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kota Makassar oleh PARA PIHAK dan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan PARA PIHAK kepada Peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Kerja Sama ini adalah Peserta yang mengikuti Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; ------
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar dengan aspek-aspek yang diases meliputi: ------

Downf	1.	Paraf 2 :	
Paran	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	20101 2	

- a. Potensi;
- b. Kompetensi.
- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar kepada **PIHAK KEDUA** berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -------

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Tempat penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA**; ------
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
 - a. Memperoleh layanan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi)
 Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; ------
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; ---
 - c. Menerima resi pembayaran dan hasil assessment. -----
- (2) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
 - a. Menyiapkan personil yang akan mengikuti Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi)
 Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; ------
 - b. Melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah peserta. -----
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:
 - a. Menerima daftar usulan nama peserta Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi)
 Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; ------
 - b. Menerima pembayaran pelaksanaan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi)
 Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; ------

(4)	PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
	a. Menyiapkan perlengkapan untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
	b. Bertanggung jawab penuh terhadap pengendalian waktu dan penyediaan personil pengawas penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
	c. Menyerahkan dokumen pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
	d. Menjaga kerahasiaan dokumen pelaksanaan dan hasil Uji Kompetensi (Pemetaan
	Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar dari selain
	PASAL 5
	PEMBIAYAAN, TARIF DAN PEMBAYARAN
(1)	Pembiayaan terhadap Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil
	Lingkup Pemerintah Kota Makassar ditanggung oleh PIHAK KESATU , dengan biaya sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),- per peserta;
(2)	Pembayaran penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri
	Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar berdasarkan jumlah orang yang mengikuti penyelenggaraan tes tersebut;
(3)	Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara kolektif oleh
	PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan
	hasil penyelenggaraan Assessment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Pemerintah Kota Makassar diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
(4)	Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui:
	Bank : BNI
	Nomor Rekening : 0098990071
	Atas Nama : Rektor UNHAS qq Bendahara Penerima
	PASAL 6
	JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1)	Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
	ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK:
2)	Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan
-)	rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir. -----

Paraf 1 : Paraf 2 :

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)	Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia;
(2)	Dalam hal terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan perjanjian
	ini maka, PARA PIHAK dengan didasari iktikad baik sepakat untuk meyelesaikannya

terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat; ------

(3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan melalui jalur hukum. ------

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (force majure) termasuk, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana alam, perang, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini; -------
- (2) PARA PIHAK tidak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (force majure); -----
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kalender terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali. ------

PASAL 9

KORESPONDENSI

Korespondensi dari PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan nomor telepon sebagai berikut: -----

I. PIHAK KESATU:

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.2, Kota Makassar.

No.tlp : 0411 - 3622357

II. PIHAK KEDUA:

Pusat Layanan Psikologi Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea

KM. 10, Kota Makassar.

081342244194 No.tlp

Paraf 1: Paraf 2:

PASAL 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pusat Layanan Psikologi Universitas Hasanuddin tentang Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022 ini dibuat di Makassar dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PUSAT LAYANAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN

MUHAMMAD TAMAR

Kepala Pusat Layanan Psikologi Universitas
Hasanuddin

PIHAK KESATU PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

ANDI SISWANTA

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

Paraf 1 : Paraf 2 :